

POPULATION POLICY

"Buku ini menampilkan pentingnya aspek kependudukan dalam pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia. Saya suka buku ini karena permasalahan dan solusi di dalamnya dirangkum dengan bagus, menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami."

—**Suharyanto, PhD**, Kepala BPS

"Buku ini sangat penting dibaca sebagai salah satu referensi utama di bidang studi kependudukan dan demografi, relatif singkat, namun memuat makna kebijakan yang mendalam, mudah dipahami, dan ditulis oleh ahlinya."

—**dr. Hasto Wardoyo, SpOG**, Kepala BKKBN

"Buku ini disajikan dengan bahasa semi-populer namun memuat substansi akademis mendalam. Pembaca dapat memperoleh wawasan demografi dan kebijakan kependudukan di Indonesia. Kita yakin bahwa pembangunan manusia unggul melalui rancangan teknokrat Kebijakan Kependudukan yang tepat akan menjadi jalan terbaik untuk masa depan Indonesia."

—**Prof. Ir. Mochamad Ashari, PhD**, Rektor ITS

"Sejak dulu saya percaya bahwa aspek demografi sangat penting untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh. Sangat baik dibaca bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat luas."

—**Letjen TNI (Purn) M. Munir**, Ketua Dewan Analis Strategis BIN

"Buku ini dapat menjadi referensi dalam merancang pembangunan berwawasan kependudukan. Tidak sekadar membahas teori, tetapi juga pengalaman praktis yang memberikan sudut pandang lengkap bagi pembaca. Buku yang recommended untuk kita baca, kita pelajari, dan kita implementasikan sesuai kondisi Indonesia."

—**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh**, Dirjen Dukcapil Kemendagri

PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
Kompas Gramedia Building
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110-53650111, Ext 3224
Webpage: www.elexmedia.id

BUSINESS & ECONOMICS Management 17+



720060437

Harga P. Jawa Rp100.000,-

POPULATION POLICY

Sonny Harry B. Harmadi
Riant Nugroho



Kata pengantar: **Puan Maharani**
Menko PMK RI

POPULATION POLICY

Solusi untuk Negeri

Sonny Harry B. Harmadi
Riant Nugroho

Kata pengantar: **Puan Maharani**
Menko PMK RI

POPULATION POLICY

POPULATION POLICY

Sonny Harry B. Harmadi
Riant Nugroho

POPULATION POLICY

Solusi untuk Negeri

Sonny Harry B. Harmadi
Riant Nugroho

POPULATION POLICY

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

POPULATION POLICY

Solusi untuk Negeri

**Sonny Harry B. Harmadi
Riant Nugroho**

Penerbit PT Elex Media Komputindo



Population Policy

Ditulis oleh Sonny Harry B. Harmadi dan Riant Nugroho

©2020 Sonny Harry B. Harmadi, Riant Nugroho

Editor: Yulian Masda (*ima@elexmedia.id*)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh:

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia - Jakarta

Anggota IKAPI, Jakarta

720060437

ISBN: 978-623-00-1041-5

Dilarang mengutip, memperbanyak,
dan menerjemahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

Pengantar Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	vii
Sekapur Sirih	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Kebijakan Kependudukan	17
Bab 3 Kependudukan dan Pembangunan Nasional	49
Bab 4 Demografi sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Manusia	99
Bab 5 Bonus Demografi	117
Bab 6 Kebijakan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	133
Bab 7 SDGs, Pembangunan, dan Nawa Cita	157
Bab 8 Isu Kebijakan Kependudukan Kontemporer	193
Bab 9 SDM Produktif dan Berdaya Saing	229
Bab 10 Penutup: SDM Unggul Indonesia Maju	247
Daftar Pustaka	269
Profil Penulis	274



PENGANTAR MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2038 yang akan datang berada dalam periode bonus demografi. Bahkan selama periode 2020–2024 mendatang, Indonesia akan mencapai periode keemasan. Rasio ketergantungan mencapai titik terendah sepanjang sejarah yang mungkin tak akan pernah terulang lagi. Selama 2020–2024, Indonesia akan berada di puncak periode bonus demografi, disebut *the window of opportunity*. Setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia non-produktif. Tidak ada pilihan lain, percepatan pembangunan manusia menjadi prasyarat transformasi bonus demografi menjadi bonus ekonomi.

Pembangunan kependudukan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia secara menyeluruh. Selama hampir 5 tahun terakhir saya menjalankan fungsi koordinasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, pemerintah senantiasa menempatkan pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Sasaran pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia ialah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing, dan membangun karakter bangsa. Pembangunan manusia dan kebudayaan

tidaklah instan. Baru terlihat dampaknya dalam jangka menengah panjang.

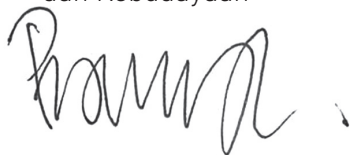
Bagaimanapun juga, strategi pembangunan manusia Indonesia harus didasarkan pada situasi penduduknya. Struktur demografi suatu negara akan menentukan arah kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, industri, hingga pertahanan-keamanan. Jumlah penduduk dan struktur umurnya menentukan besarnya kebutuhan pangan, obat, pendidikan, lapangan kerja baru, bahkan jumlah perangkat pertahanan keamanan yang harus disiapkan. Jumlah dan komposisi penduduk berdampak langsung terhadap kebijakan anggaran negara. Begitu menentukannya, sehingga data kependudukan yang lengkap harus menjadi pijakan para pembuat kebijakan dalam merancang setiap program dan kegiatannya.

Saya memberi apresiasi terhadap terbitnya buku ini, *Population Policy*. Buku ini dapat menjadi referensi para pembuat kebijakan baik di pusat maupun di daerah, para dosen dan peneliti bidang kependudukan serta praktisi pembangunan. Semoga buku ini dapat memperkaya wawasan pembaca tentang kependudukan, Kebijakan Publik, dan Kebijakan Kependudukan. Selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 16 September 2019

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



Puan Maharani

SEKAPUR SIRIH PENULIS

Buku ini lahir dari keinginan berbagi pengetahuan bidang kependudukan dan Kebijakan Publik yang ditekuni penulis. Sebelum membaca lebih lanjut, kami akan mengurai sedikit tentang makna Kebijakan Kependudukan.

Terminologi kependudukan didefinisikan sebagai hal ihwal yang terkait penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Seseorang dianggap penduduk suatu wilayah bisa dilihat dari 2 pendekatan, secara *de jure* atau *de facto*. Secara *de jure* maknanya bahwa orang tersebut memiliki bukti dokumen kependudukan yang sah sebagai penduduk di suatu wilayah. Misalkan si Asya termasuk penduduk Kota Bandung yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) Kota Bandung. Pendekatan *de facto* mencatat penduduk sesuai fakta lokasi tinggal saat dilakukan pencacahan. Pendekatan ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Misalnya, Bonar secara *de jure* terbukti sebagai penduduk Kota Medan. Saat pencacahan penduduk oleh BPS, Asya sedang tinggal di Makassar. Kebetulan pula Bonar sudah tinggal lebih dari 6 bulan di Makassar namun tidak ingin pindah status kependudukan, sehingga masih tercatat sesuai dokumen KTP-nya sebagai penduduk Medan. Secara *de jure* Bonar adalah penduduk Medan, namun secara *de facto* dia menjadi bagian dari penduduk Makassar.

Seseorang dianggap penduduk suatu wilayah melalui dua pendekatan, secara *de jure* atau *de facto*. Secara *de jure* bermakna bahwa orang tersebut memiliki bukti dokumen kependudukan yang sah sebagai penduduk di suatu wilayah. Misalnya, Asya termasuk penduduk Kota Bandung yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung. Pendekatan *de facto* mencatat penduduk sesuai fakta lokasi tinggal saat dilakukan pencacahan. Pendekatan ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Misalnya, Bonar secara *de jure* terbukti sebagai penduduk Kota Medan, namun saat pencacahan penduduk oleh BPS, sedang tinggal di Kota Makassar. Meskipun sudah lebih dari enam bulan tinggal di Kota Makassar, Bonar tidak ingin pindah status kependudukan, sehingga sesuai dokumen KTP-nya masih tercatat sebagai penduduk Kota Medan. Secara *de jure* Bonar adalah penduduk Kota Medan, namun secara *de facto* menjadi bagian penduduk Kota Makassar.

Kebijakan Kependudukan dapat dimaknai sebagai segala bentuk regulasi dan petunjuk umum ataupun serangkaian program dan serangkaian kegiatan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu kependudukan. Kebijakan Kependudukan dimaksudkan untuk mencapai situasi kependudukan tertentu yang dianggap ideal untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan itu sendiri didefinisikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan lebih baik. Intinya, Kebijakan Kependudukan ialah Kebijakan Publik yang diharapkan dapat memengaruhi kondisi atau situasi jumlah, struktur/komposisi, dan persebaran penduduk agar mendukung keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang. Jika cita-cita pembangunan Indonesia adalah terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Kebijakan Kependudukan harus dirancang agar situasi kependudukan dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut.

Perlu dipahami bahwa Kebijakan Kependudukan berdampak terhadap situasi kependudukan dalam jangka panjang, yang hasilnya baru bisa diukur dan dilihat setelah 10 atau 20 tahun kemudian. Tidak ada Kebijakan Kependudukan yang instan dan dampaknya dapat dilihat secara langsung saat kebijakan ditetapkan. Oleh karenanya, bagi sebagian pengambil kebijakan di pemerintahan, Kebijakan Kependudukan belum tentu menarik untuk diprioritaskan, karena baru berdampak setelah selesai masa tugasnya sebagai pimpinan di birokrasi.

Kita bisa belajar dari kebijakan Keluarga Berencana (KB) yang dirancang untuk dapat menciptakan kondisi penduduk tumbuh seimbang dalam jangka panjang. Selama periode 1940-an, Widjojo Nitisastro memperkirakan jumlah penduduk Indonesia relatif stabil, bahkan cenderung sedikit menurun. Sebelum tahun 1945, penduduk Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Tingkat kematian tinggi, angka kelahiran relatif rendah akibat rendahnya angka perkawinan. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan karena penjajah ingin merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Perang terus berlangsung dan stabilitas ekonomi, sosial, politik belum bisa diraih hingga tahun 1949 saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Masuk periode 1950-an, penduduk Indonesia mengalami euforia kemerdekaan, angka perkawinan naik drastis. Dampaknya, selama tahun 1950-an terjadi *the first baby boom era in Indonesia*, angka kelahiran yang sangat tinggi. Dari gambaran situasi kependudukan tahun 1950-an, kita dapat memproyeksikan bahwa di awal 1970-an, para bayi yang lahir 1950-an tersebut akan butuh pekerjaan, menikah, dan punya anak.

Apa yang bisa dilakukan para pengambil kebijakan saat itu? Mereka tentu harus melihat bahwa situasi kependudukan yang terjadi di tahun 1950-an akan berdampak besar terhadap kondisi

di tahun 1970-an. Para pembuat kebijakan saat itu yakin bahwa mereka yang lahir begitu banyak di tahun 1950-an akan masuk ke pasar kerja dan menikah di tahun 1970-an. Dampaknya, di tahun 1970-an terjadi *the second baby boom era* dan jumlah tenaga kerja muda berlimpah. Tidak mengherankan pada awal 1970-an pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dan membangun industri padat karya (*labor intensive industry*).

Sebelum memahami lebih lanjut tentang Kebijakan Kependudukan, kita harus mengerti terlebih dahulu perbedaan mendasar antara kependudukan dan demografi. Demografi adalah studi tentang besaran, komposisi, dan proses kehidupan manusia, yang mencakup kelahiran, kematian, migrasi, dan perkawinan. Studi kependudukan menganalisis kaitan antara variabel-variabel demografi tersebut dan variabel sosial, ekonomi, politik, budaya, ekologi. Kebijakan Kependudukan terkait dengan upaya-upaya untuk memengaruhi variabel demografi agar dapat mendukung tujuan pembangunan secara keseluruhan, termasuk pembangunan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lingkungan.

Kebijakan Kependudukan yang terkait fertilitas (kelahiran) misalnya, dilaksanakan melalui penyusunan berbagai regulasi, perencanaan, program, dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pengendalian angka kelahiran. Pengendalian dimaksud di antaranya advokasi program KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, upaya pendewasaan usia kawin, dan sebagainya. Harapannya, terkendalinya angka kelahiran dapat mengurangi *population pressure*, sehingga berdampak terhadap daya dukung lingkungan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi risiko konflik sosial.

Kebijakan Kependudukan yang terkait mortalitas diarahkan untuk menekan angka kematian, meningkatkan usia harapan

hidup. Kebijakan menekan angka kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan menjadi beberapa contoh Kebijakan Kependudukan yang terkait mortalitas. Program KB juga dapat dianggap Kebijakan Kependudukan yang terkait mortalitas. Contohnya, pengaturan jarak antarkelahiran/kehamilan dalam program KB dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Kebijakan transmigrasi menjadi contoh lain Kebijakan Kependudukan.

Transmigrasi berdampak terhadap persebaran penduduk antar-wilayah. Meskipun sebagian pakar berpendapat bahwa transmigrasi adalah kebijakan pengembangan wilayah, sesungguhnya argumen dasar kebijakan transmigrasi adalah kependudukan, lebih tepatnya persebaran penduduk. Namun demikian, transmigrasi harus dirancang untuk memberi manfaat nyata bagi perkembangan ekonomi di daerah tujuan, dan meminimalkan risiko terjadinya konflik sosial antara pendatang dan penduduk lokal.

Buku ini terbit saat Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi. Perlu dipahami bahwa sejak 2012 lalu Indonesia sudah masuk dalam periode bonus demografi. Jika menggunakan data proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (dengan data dasar Sensus Penduduk 2010), periode bonus demografi akan berakhir di tahun 2042 dengan puncaknya (*the window of opportunity*) selama 2028–2031. Kondisi *the window of opportunity* (jendela peluang) terjadi saat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Namun, jika kita menggunakan angka proyeksi penduduk Indonesia 2015–2045 (yang didasarkan pada Survei Penduduk Antar-Sensus 2015), bonus demografi akan berakhir lebih cepat di tahun 2038. Selain itu, periode emas (*the window of opportunity*) maju menjadi 2020–2024. Maknanya, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi (2020–2024), Indonesia sedang berada dalam puncak

periode bonus demografi. Penyediaan lapangan kerja dalam jumlah yang besar mutlak dibutuhkan, agar penduduk usia produktif dapat produktif dalam arti yang sesungguhnya. Kegagalan mentransformasi bonus demografi menjadi bonus ekonomi atau kesejahteraan akan berimplikasi dalam jangka panjang. Mengapa demikian? Karena setelah berakhirnya era bonus demografi, Indonesia akan memasuki *ageing society* yang ditandai dengan berlimpahnya penduduk lanjut usia (lansia), penduduk usia 65 tahun ke atas.

Proporsi lansia meningkat drastis. Jika kita mampu memanfaatkan bonus demografi, mereka akan menjadi lansia yang sejahtera, memiliki tabungan, dan tidak terlalu bergantung pada kelompok usia produktif. Namun, jika bonus demografi tidak berhasil ditransformasi menjadi bonus ekonomi, mereka akan menjadi lansia yang bergantung pada kelompok penduduk usia produktif.

Bagi sebagian ahli, ada yang berpendapat bahwa strategi untuk memperpanjang periode bonus demografi adalah dengan cara sedikit menaikkan angka kelahiran, terutama di periode 2020–2024. Tujuannya agar batas akhir bonus demografi di 2038 dapat diperpanjang beberapa tahun lagi. Setidaknya, angka kelahiran beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, DIY, Bali, Jatim, dan Sulut, tidak perlu ditekan lagi karena sudah sangat rendah. Program Keluarga Berencana tidak lagi berfokus pada pengendalian kelahiran, tetapi lebih pada upaya membangun keluarga berkualitas sekaligus menjaga momentum penduduk tumbuh seimbang.

Pada pertengahan tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Mengelola negara berpenduduk besar seperti Indonesia, tentu bukan per-

kara mudah, termasuk merancang Kebijakan Kependudukannya. Bandingkan dengan jumlah penduduk negara tetangga kita di tahun 2019, seperti Australia (25 juta jiwa), Malaysia (32 juta jiwa), Thailand (70 juta jiwa), Singapura (hampir 6 juta jiwa), ataupun Filipina (108 juta jiwa). Di tahun 2019, lebih dari 40 persen penduduk Asia Tenggara (yang dihuni oleh sekitar 663 juta jiwa) adalah penduduk Indonesia. Di satu sisi, Kebijakan Kependudukan berdampak terhadap capaian pembangunan secara keseluruhan.

Di sisi lain, kinerja sektor pembangunan lainnya juga berdampak terhadap situasi kependudukan. Sebagai contoh, keberhasilan pemerintah untuk terus meningkatkan pendidikan penduduk Indonesia, secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap penurunan angka kelahiran. Jika tingkat pendidikan penduduk perempuan yang naik, dampaknya adalah terhadap pendewasaan usia perkawinan. Jika usia perkawinan perempuan naik, rentang waktu reproduksi mereka akan lebih pendek sehingga cenderung memiliki sedikit anak.

Ambil contoh jika seorang perempuan menikah di usia 16 tahun, masa reproduksinya adalah antara usia 15 dan 45 tahun. Berarti, selama 30 tahun ia memiliki kesempatan untuk hamil dan melahirkan. Ada peluang besar untuk memiliki banyak anak. Sebaliknya, jika ia menikah di usia 25 tahun, kesempatan reproduksinya antara usia 25 dan 45 tahun, sehingga menurunkan peluangnya untuk punya banyak anak. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan pendidikan akan berdampak terhadap penurunan angka kelahiran. Kita juga dapat menganalisis dari sisi sebaliknya, bahwa kebijakan KB berhasil menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 1971, perempuan Indonesia rata-rata memiliki 5 hingga 6 anak, dengan kecenderungan 6 anak. Namun, di tahun 2019, jumlah anak per perempuan secara rata-rata hanya 2 hingga 3 anak, dengan kecenderungan 2 anak.

Menurunnya jumlah anak per perempuan atau per keluarga akan meningkatkan kemampuan keluarga untuk melakukan investasi sumber daya manusia bagi anak mereka. Meningkatnya kemampuan keluarga untuk menyekolahkan anak akan berdampak terhadap kinerja pembangunan sektor pendidikan.

Dus, tantangan pembangunan dan pengelolaan kependudukan Indonesia adalah tantangan kebijakan, lebih dari tantangan-tantangan teknis dan sektor. Disebut sebagai “tantangan kebijakan”, karena kebijakan pasti antar-inter-intra sektor. Artinya, Kebijakan Kependudukan tidak bisa dilihat secara parsial, tanpa mengaitkannya dengan kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Contoh di atas memberi gambaran sederhana bahwa Kebijakan Kependudukan mendukung pembangunan pendidikan, dan kebijakan pendidikan mendukung pembangunan kependudukan. Analogi yang sama dapat digunakan untuk menganalisis kaitan antara Kebijakan Kependudukan dan kebijakan sektor lainnya.

Tantangan terkini adalah memahami kependudukan dalam konteks Kebijakan Publik yang mendasar, secara prinsip-prinsip¹. Kebijakan Publik adalah keputusan politik yang melembaga, bukan personal atau individu. Kebijakan Publik adalah strategi/cara/teknologi/instrumen/alat untuk mengantar masyarakat dari kondisi saat ini hingga mencapai kondisi masyarakat yang dikehendaki. Jadi, Kebijakan Publik (yang sering disebut-sebut dengan gagah itu) adalah (baca: hanyalah) sebuah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Dalam perjalanan pembelajaran dan praktik, ditemukan setidaknya 10 prinsip dasar Kebijakan Publik yang harus dipenuhi setiap pemerintah. *Pertama*, prinsip publik. Kebijakan Publik

¹ Riant Nugroho, “Rembugnas 2017: Membangun Kebijakan Publik Unggul”, koran *Sindo*, Jumat, 20 Oktober 2017.

adalah kebijakan untuk publik sehingga sejak awal meletakkan unsur kepentingan publik di atas kepentingan lainnya.

Kedua, kolaborasi kognitif; dalam hal ini, pembuat kebijakan menggunakan konsep, teori, dan metode pembuatan Kebijakan Publik, termasuk analisis kebijakannya, secara baik dan dijadikan sebagai perhatian utama dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketiga, kolaborasi nilai; dalam hal ini, pembuat kebijakan mampu masuk ke ranah empati kepada publik yang menjadi target kebijakan.

Keempat, titik tiada kembali (*a point of no return*); Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali sehingga harus dibuat dengan serius dan sungguh-sungguh.

Kelima, kebijakan tidak cukup sekadar baik, tetapi unggul. Kebijakan yang baik sering menjadi penghambat kebijakan yang unggul. Pemerintah kerap berpuas diri karena mempunyai kebijakan yang baik, yang kemudian gagal masuk ranah unggul.

Keenam, Kebijakan Publik lebih sebagai proses manajemen daripada proses politik. Proses politik hanya diperlukan pada saat pembuatan keputusan.

Ketujuh, Kebijakan Publik adalah masalah moral, bukan teknis. Kebijakan Publik pada awal dan akhir adalah tentang moralitas manusia pembuat kebijakan, yang berarti moralitas pemerintah, bukan tentang masalah-masalah teknis.

Kedelapan, Kebijakan Publik adalah kehormatan untuk pemerintah, bukannya tugas. Sebagai sebuah kehormatan, sudah pasti dilakukan dengan cara-cara yang terhormat dan menghasilkan praktik-praktik yang terhormat. Pertanyaannya kini adalah, sudahkah kita merasakan bahwa Kebijakan Publik dilaksanakan sebagai suatu kehormatan daripada tugas dan wewenang?

Kesembilan, Kebijakan Publik adalah untuk memuliakan rakyat, bukan untuk menghukum. Kebijakan Publik muncul ketika negara berubah dari negara ketertiban ke negara kesejahteraan. Jika negara ketertiban cukup diatur oleh hukum, kesejahteraan tidak dapat dicapai dengan hukum, tetapi dengan Kebijakan Publik.

Kesepuluh, Kebijakan Publik adalah pembelajaran yang baik bagi suatu bangsa untuk hidup lebih baik dari masa lalu dan hari ini. Kebijakan Publik bertugas membangun pembelajaran bangsa menuju kehidupan yang lebih baik, lebih beradab, dan lebih menang.

Kembali, Kebijakan Publik adalah dan senantiasa lintas-antar-dan-inter sektor, tidak parsial, sektoral, apalagi silostik. Kami berpendapat bahwa buku ini tidak hanya dapat dibaca oleh para pembuat kebijakan ataupun pemerhati kependudukan, tetapi juga oleh para pembuat kebijakan, pengamat, dan akademisi yang berkecimpung di sektor pembangunan, baik dalam lingkup yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang kependudukan.

Tentu masih banyak ketidaksempurnaan dalam buku ini karena menyatukan pandangan dua orang penulis yang memiliki gaya bahasa dan bidang keahlian berbeda. Dengan tangan terbuka, kami menerima setiap masukan dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kami berharap, sekecil apa pun manfaatnya, buku ini tetap memberi tambahan pengetahuan bagi para pembaca, baik para pembuat kebijakan, sivitas akademika, praktisi, penulis, maupun pembaca lain yang memiliki ketertarikan dengan isu pembangunan, khususnya pembangunan kependudukan.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah berkenan

memberi Kata Pengantar sebagai bentuk apresiasi atas karya ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersedianya data dan masukan bagi penyelesaian buku ini. Semoga, setiap langkah kita membangun Indonesia, senantiasa didasarkan pada data, situasi, dan analisis kependudukan, baik di pusat maupun di daerah, di segala sektor yang berdampak bagi hajat hidup orang banyak.

Terima kasih,

Sonny Harry B. Harmadi

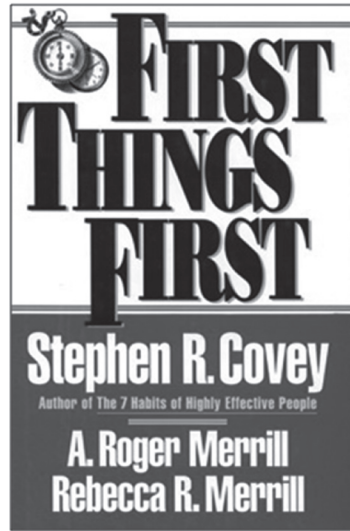
Riant Nugroho

BAB 1

PENDAHULUAN



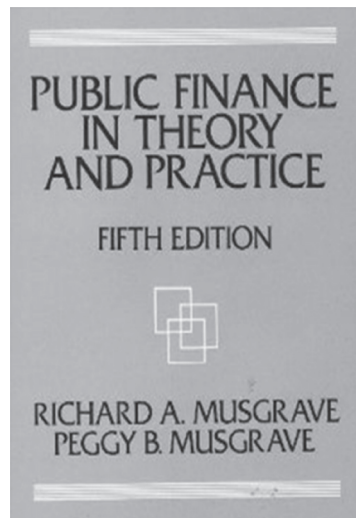
Keunggulan negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut membangun kebijakan-kebijakan publik unggul dibanding faktor-faktor lainnya, termasuk faktor kekayaan alam. Negara-negara dengan keterbatasan kekayaan alam yang ekstrem, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, adalah contohnya. Mereka tidak saja berhasil keluar dari keterbatasan kekayaan alamnya, tetapi menguasai kekayaan alam negara lain dalam jumlah mencengangkan. Bahkan, yang mereka kuasai bukan hanya akses akan kekayaan alam, kinerja pembangunan negara-negara lain pun bergantung pada kebijakan mereka.



Pada banyak kasus ditemukan, sebagian besar, kalau tidak hendak dikatakan semuanya, negara-negara berkembang gagal dalam membangun, mempertahankan pembangunan, bahkan gagal dalam pembangunan. Kategori pertama, mereka gagal mengetahui dan memahami bahwa kebijakan publik itu adalah faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan negara, bahkan penyelenggaraan negara. Akibatnya, pimpinan pemerintahan “asyik” bermain “politik” dan “proyek” daripada membangun kebijakan publiknya. Kategori kedua, mereka gagal mengetahui kebijakan apa yang harus diprioritaskan. Ini adalah kesalahan yang banyak terjadi di berbagai negara. Prioritas adalah inti dari manajemen organisasi, atau dalam istilah Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, dan Rebecca R. Merrill (1995) sebagai “mengutamakan yang utama” atau “*First Things First*”. Setiap Kepala Pemerintahan, Presiden, Perdana Menteri, pasti menghadapi keterbatasan-keterbatasan, terutama keterbatasan waktu, karena masa

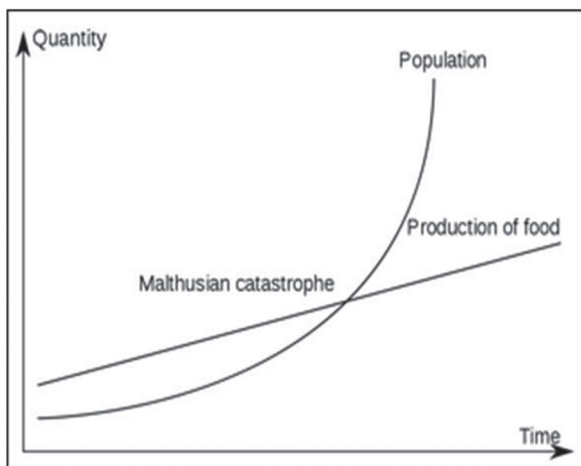
kerja dibatasi oleh pemilihan umum berikutnya; uang, karena jumlah anggaran negara selalu kurang dari seluruh kebutuhan pengeluaran negara; dan manusia, karena jumlah manusia yang cerdas dan terampil dalam membantu penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional senantiasa terbatas, sehingga pikiran-pikiran cerdas dan tangan-tangan terampil pun terbatas. Dengan demikian, "portofolio" setiap Kepala Pemerintahan harus berfokus pada "apa yang utama" dari seluruh jajaran prioritas kebijakan yang perlu dibangun terlebih dulu.

Dari perjalanan pembelajaran, penelitian, dan pengajaran kami selama dua puluh tahun terakhir, pada berbagai negara yang berhasil dan gagal, di berbagai belahan dunia, ditemukan bahwa ada dua kebijakan publik yang dapat dikategorikan sebagai *utama* sehingga harus masuk kategori *first thing first*, yaitu kebijakan *Keuangan Negara* dan kebijakan *Kependudukan Nasional*. Mengapa? Pertama, Kebijakan Keuangan Negara. Richard



A. Musgrave, Guru Besar Emeritus Ekonomi Politik Harvard University dan Peggy B. Musgrave, Guru Besar Ekonomi Universitas California - Santa Cruz, dalam karya klasiknya *Public Finance in Theory and Practice* (1989/1973: 6) menjelaskan bahwa Kebijakan Keuangan Negara atau kebijakan *public finance* adalah kebijakan yang berkenaan dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian suatu negara, khususnya dalam bentuk alokasi, redistribusi, dan stabilitas kekayaan negara, dan secara lebih khusus anggaran negara. Kebijakan alokasi berkenaan dengan penyediaan *public goods*

and services, atau barang dan jasa yang tidak dapat diberikan oleh atau melalui pasar dan mekanismenya. Fungsi distribusi berkenaan dengan redistribusi pendapatan atau kesejahteraan sehingga negara dianggap "adil" (*fair*), melalui mekanisme pajak. Stabilitas berkenaan dengan upaya menjaga tingkat pengangguran yang rendah atau *employment rate* yang tinggi, tingkat harga, keseimbangan neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. David N. Hyman dalam *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy* (2011, 1982) menjelaskan lebih sederhana lagi, bahwa Keuangan Negara adalah kegiatan ekonomi dari negara, dan itu berarti tentang suplai produk yang tidak dapat dihasilkan melalui mekanisme pasar, berkenaan dengan *public goods*, pilihan publik, dan keseimbangan. Arye L. Hillman dalam *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government* (2009: 18–19) menjelaskan bahwa Keuangan Negara berkenaan dengan kegiatan negara untuk menghasilkan barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar, yaitu *public goods*, barang atau produk dengan eksternalitas yang tinggi, memiliki sifat monopoli alamiah, dan memiliki informasi yang asimetris.

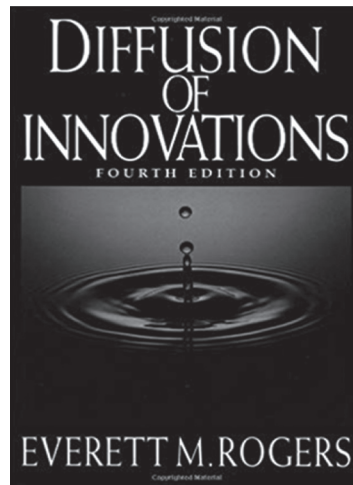


Sumber: <http://klikgeografi.blogspot.com/2015/03/teori-ledakan-penduduk-malthus.html>

Semua penjelasan tentang Keuangan Negara tersebut benar. Dalam UU No. 13/2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Namun demikian, “Keuangan Negara” dapat dipahami dalam bahasa yang paling sederhana sebagai *uang yang dimiliki negara dan dikelola untuk kebutuhan rakyat, warga negara, penduduk negara tersebut*. Mengapa? Karena sebuah kesatuan atau entitas sosial yang disebut sebagai bangsa (*nation*) dan entitas politik yang disebut sebagai negara (*country*) memerlukan sebuah pengelolaan yang mandiri oleh sebuah lembaga yang disebut Pemerintahan (*State*) dengan intinya bernama Pemerintah (*government*), yang menyediakan barang dan jasa yang “tidak mungkin” atau “tidak efisien” dan “tidak efektif” jika dilayani oleh pasar dan mekanismenya, karena, seperti penjelasan Hillman, produk memiliki sifat publik, eksternalitas tinggi, monopoli alamiah, dan senantiasa mengandung informasi yang asimetris. Dalam bahasa lebih sederhana lagi adalah “jumlah uang *untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga*”. Dalam buku ini, tentu saja, kami tidak mengulas tentang Kebijakan Keuangan Negara, melainkan kebijakan terpenting yang kedua.

Kebijakan terpenting kedua bagi negara berkembang adalah *Kebijakan Kependudukan*. Thomas Robert Malthus, ekonom mazhab klasik Inggris (1776–1834), kolega Adam Smith, hidup di era ekonomi yang suram, pertama kali dikenal sebagai ilmuwan sosial yang mengedepankan pentingnya Kebijakan Kependudukan. Pada bukunya *An Essay on the Principles of Population* (1798) Malthus mengemukakan “hukum” bahwa “populasi manusia cenderung bertambah menurut deret ukur, dan produksi makanan (sumber daya alam) cenderung bertambah menurut deret hitung”.

Model ini disimulasikan oleh Kelompok Roma (*The Club of Rome*) dan menghasilkan sebuah prediksi masa depan yang memunculkan. Jika manusia tidak belajar mengendalikan pertumbuhannya, pada titik tertentu akan terjadi kemerosotan peradaban karena kurangnya persediaan sarana hidup, khususnya pangan dan energi. *Limits to Growth* (LTG) adalah laporan Kelompok Roma (1972) tentang simulasi komputer pertumbuhan ekonomi dan penduduk secara eksponensial dengan pasokan sumber daya yang terbatas. Pemahaman tentang jumlah penduduk tak terkendali dapat menciptakan kesengsaraan baru yang akut di masa depan menjadi perhatian dari Pemerintah Korea Selatan sehingga melahirkan kebijakan Keluarga Berencana, sebagaimana ditulis oleh Everett M. Rogers dalam *Diffusion of Innovation* (1976), yang kemudian dikembangkan di Indonesia pada era Presiden Soeharto, atau "Orde Baru", sebagai kebijakan *Keluarga Berencana*, dan kemudian yang paling "ekstrem" adalah kebijakan "One Child" di China sebagai kebijakan "Keluarga Berencana" yang mengizinkan satu



keluarga hanya punya satu anak. Kebijakan ini dimulai dari tahun 1978 hingga 2015 sebagai Kebijakan Keluarga Berencana. Sebanyak 76% penduduk mendukung kebijakan ini. Sekitar 250 dan 300 juta kelahiran dicegah dari 1978 hingga tahun 2000 dan 400 juta kelahiran dari 1979 hingga 2010. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemimpin tinggi Deng Xiaoping pada tahun 1979 untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk RRC, menentang kebijakan pendahulunya, Mao Zedong (1949) yang mengutamakan penambahan jumlah manusia sebagai tenaga kerja. Meskipun

kebijakan tersebut banyak dikritik “tidak manusiawi”, China dapat menjaga ledakan penduduk, dan kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, bahkan digadang-gadang menjadi nomor satu. Susan Greenhalgh and Edwin A. Winckler menulis pengalaman tersebut pada *Governing China's Population: from Leninist to neoliberal biopolitics* (2005). Keluarga Berencana menjadi topik bahkan di “era millennial”, ketika Konferensi Internasional tentang Program KB atau International Conference on Family Planning (ICFP) ke-4 di Nusa Dua, Bali, tahun 2016. Program Keluarga Berencana (KB) diakui telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di hampir semua negara. Bahkan, program KB diyakini menjadi instrumen penting dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) di 2030.



Pertanyaannya, mengapa sudah banyak negara berkembang yang menjalankan Kebijakan Keluarga Berencana sebagai Kebijakan Kependudukan yang dianggap terbaik, namun masih juga masuk kategori “gagal”? Alasannya adalah karena kebanyakan

negara memahami “Kebijakan Kependudukan” sebagai “kebijakan demografi”. Memang, kepustakaan tentang Population pasti berbicara *Demography*, sebagaimana karya Hauser dan Duncan *The Study of Population* (1959), yang pada Bab Pertama membahas tentang *Demography as a Science*. Memang, kependudukan berkenaan dengan *demografi*, namun *Kebijakan Kependudukan* lebih dari “sekadar” demografi.

Jika Kebijakan Keuangan Negara berkenaan dengan “berapa uang negara”, Kebijakan Kependudukan berkenaan dengan pengambilan keputusan yang memengaruhi kuantitas, kualitas, mobilitas, dan administrasi penduduk. Kebijakan Kependudukan tentu didasarkan pada situasi demografis yang ada dan analisis dampaknya terhadap berbagai aspek pembangunan lainnya. Dalam bahasa sederhana, apa yang kita putuskan berkenaan dengan penduduk, akan berdampak terhadap “berapa banyak manusia yang harus ‘diberi makan’ secara fisik, psikologikal, intelektual, mental, dan rohani atau religiusitas”. “Makanan” fisik mulai dari perlindungan dan keselamatan fisik hingga asupan gizi dan kesehatan; secara psikologikal dalam bentuk membangun lingkungan yang baik untuk optimalitas tumbuh kembang manusia, mulai dari hunian hingga lingkungan kerja²; secara intelektual berarti berkenaan dengan pendidikan; mental berarti kebijakan yang membangun karakter bangsa³ (Riant Nugroho, 2018); dan “makanan” rohani berkenaan dengan kehidupan beragama dan antarumat beragama yang berhasil.

Jadi, Kebijakan Kependudukan pada awalnya memang terkait langsung dengan variabel demografi beserta targetnya. Semisal, angka kelahiran total (*total fertility-rate*) Indonesia di tahun

² Pembaca dari latar belakang sosiolog dapat menerjemahkan sebagai “makanan sosial” daripada “makanan psikologikal”.

³ *Kebijakan Membangun Karakter Bangsa*.

1971 sebesar 5,6 anak perempuan, ditargetkan turun hingga mencapai *replacement level* 2,1 anak di tahun 2020. Serangkaian kebijakan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Namun sebenarnya, target penurunan dari 5,6 anak menjadi 2,1 anak didasarkan pada target-target pembangunan lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta perbaikan kesehatan ibu dan anak. Maknanya, Kebijakan Kependudukan juga diartikan sebagai kebijakan perlindungan manusia (*human protection*) atau yang juga dipahami sebagai keamanan manusia (*human security*), yang berkenaan dengan keamanan fisik hingga keamanan kesehatan, dan kebijakan pembangunan manusia (*human development*).

Negara-negara berkembang biasanya mempunyai dua masalah berkenaan dengan pemahaman ini. Pertama, mereka memahami *Kebijakan Kependudukan* secara klasik atau konvensional, semata-mata demografi, sehingga kebijakannya menjadi miskin, parsial, dan terpinggirkan, atau setidaknya "mudah dipinggirkan". Misalnya, dipahami bahwa angka kelahiran harus terus diturunkan, semakin rendah, semakin baik. Padahal, angka kelahiran yang terlalu rendah juga akan berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi dan besarnya pasar dalam jangka panjang. Kebijakan "one child policy" di China misalnya, di satu sisi berhasil menurunkan jumlah penduduk, namun di sisi lain menciptakan kondisi "the only and lonely". Anak tunggal yang kesepian dan dimanja telah mengubah *attitude* mereka.

Kedua, membangun kebijakan *human security* dan *human development* dengan mengabaikan dasar filosofinya sebagai *Kebijakan Kependudukan* yang berbasis awal dari *demografi*, sebagai "ilmu jumlah dan persebaran manusia". Akibatnya, kebijakan-kebijakan di sektor sosial menjadi kompartemental, seperti silo-silo atau cerobong asap di pabrik-pabrik yang terpisah satu sama lain, dengan dampak: kebijakan yang mahal namun

tidak menghasilkan, atau tidak efektif, karena hadir terpisah-pisah.

Jadi, Kebijakan Kependudukan sebenarnya tentang manusia dalam arti luas, memang berkenaan dengan *jumlah, struktur, pertumbuhan dan persebaran*, namun yang terpenting adalah *perbaikan kualitas dan standar hidup manusia*. Bagian pertama—jumlah, persebaran, komposisi—berkenaan dengan demografi, dan yang kedua—kualitas—adalah Kebijakan Kependudukan *beyond demography*, yang berkenaan dengan tantangan meningkatkan kualitas penduduk.

Hingga di sini, kita dapat memahami bahwa dua kebijakan paling penting adalah *Kebijakan Keuangan Negara* yang berkenaan dengan berapa banyak “uang” negara untuk “memberi makan” rakyat, dan Kebijakan Kependudukan tentang bagaimana kondisi rakyat yang “hendak diberi makan” tersebut. Kesesuaian antarkeduanya akan menghantar setiap negara pada keberhasilan. Dalam beberapa kesempatan, di awal terpilihnya Presiden Joko Widodo, Tim Transisi Jokowi-JK sudah memulai gagasan genial tersebut dengan mengungkapkan ke publik tentang rencana pembentukan suatu kementerian khusus yang menangani kependudukan (kementerian kependudukan). Suatu rencana yang perlu diapresiasi dan didukung. Terakhir kali Indonesia memiliki Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie yang berakhir tahun 1999 lalu. Dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, sempat selama hampir 2 tahun Indonesia memiliki kementerian terkait urusan kependudukan, yaitu Kementerian Transmigrasi dan Kependudukan. Selanjutnya, urusan transmigrasi digabung dengan ketenagakerjaan, dan kependudukan ditangani oleh Badan Kependudukan Nasional (Baknas) yang ternyata tidak berumur panjang.

Wacana saat itu untuk membentuk Kementerian Kependudukan ditanggapi secara positif oleh banyak pihak mengingat hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan menempatkan penduduk sebagai basis dasar pembangunan. Revolusi mental yang menjadi agenda prioritas pembangunan 2014–2019 seharusnya jelas dimaknai sebagai pembangunan yang berfokus pada manusia (penduduk). Perubahan mental penduduklah yang menjadi target revolusi mental. Setidaknya, ada 5 argumen dasar tentang pentingnya kementerian kependudukan dalam pemerintahan di Indonesia.

Argumen pertama terkait konstitusi. Merujuk pada konstitusi UUD 1945, ada 24 urusan pemerintahan, yaitu keuangan negara, hukum, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, kesehatan, keamanan, kependudukan dan catatan sipil, hak anak, seni dan budaya, kewarganegaraan, agama dan kepercayaan, komunikasi dan informasi, tempat tinggal, lingkungan hidup, pertanahan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan nasional, sumber daya alam, perekonomian, sosial/kesejahteraan rakyat, fasilitas pelayanan umum/infrastruktur, dalam negeri dan luar negeri. Urusan-urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh kelembagaan pemerintah dan secara implementatif diakomodasi ke dalam 34 Kementerian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dari urusan-urusan tersebut, urusan kependudukan dan catatan sipil serta urusan kewarganegaraan tidak secara eksplisit diakomodasi menjadi lembaga kementerian. Padahal, kependudukan merupakan urusan yang diamanatkan secara tegas dalam konstitusi, sehingga posisinya dinilai sangat penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Argumen kedua menyangkut data kependudukan. Kementerian kependudukan diperlukan untuk mempersiapkan dan

mengintegrasikan seluruh data kependudukan serta memastikan bahwa data kependudukan yang menjadi acuan seluruh kementerian bersumber dari atau disetujui oleh kementerian kependudukan. Jika data kependudukan yang digunakan akurat, dapat dipercaya, selalu dimutakhirkan, dan mudah diakses (kecuali data yang sifatnya pribadi dan rahasia), manfaatnya tentu akan banyak bagi pembangunan Indonesia. Pertama, keberhasilan demokrasi berawal dari data penduduk yang akurat, sehingga data pemilih juga akurat dan pemilu menjadi kredibel. Kedua, intervensi apa pun oleh pemerintah, efektivitasnya sangat bergantung pada data penduduk yang akurat. Ketiga, data penduduk sangat dibutuhkan untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan, konflik, dan sebagainya. Keempat, setiap penduduk dapat melacak keturunan dan asal muasal dirinya, sehingga dapat diketahui *family tree* (silsilah keluarga) yang lengkap, tanpa mengandalkan catatan silsilah semata. Kelima, pemerintah dapat mengetahui potensi penduduknya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Argumen ketiga berhubungan dengan kewenangan menyusun peraturan perundang-undangan. Status Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bukan kementerian, menyebabkan Kepala BKKBN bukan anggota kabinet dan BKKBN tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan undang-undang (UU). Dengan demikian, BKKBN tidak dapat secara langsung menyusun kebijakan kependudukan. Salah satu dampak yang dapat kita deteksi saat ini adalah lambatnya penyusunan PP turunan UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi acuan pembangunan kependudukan di Indonesia.

Argumen keempat terkait pentingnya pengarusutamaan kependudukan dalam seluruh aspek pembangunan. Apa pun sektor

pembangunan seharusnya dikaitkan dengan penduduk. Setiap tahun jumlah kelahiran diproyeksikan mencapai hampir lebih dari 4,5 juta kelahiran. Konsekuensinya, pemerintah wajib menyediakan, menambah, dan memperluas layanan dasar pemerintahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar warga negara berupa penambahan sarana dan prasarana publik. Untuk menyediakan kebutuhan tersebut dibutuhkan anggaran negara yang didesain berdasarkan situasi kependudukan. Pemerintah meletakkan penduduk sebagai basis pembangunan bangsa (*demographic based development*).

Argumen kelima berhubungan dengan stagnannya kinerja pembangunan kependudukan saat ini, khususnya di daerah. Di tingkat daerah, urusan kependudukan mayoritas dikelola dalam struktur yang bergabung dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kepemudaan. Pembangunan kependudukan menjadi tidak terfokus dan terjadi kekeliruan dalam memandang pembangunan kependudukan seolah-olah hanya menjadi bagian dari urusan perempuan dan anak. Padahal yang lebih tepat, pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda justru merupakan bagian dari pembangunan kependudukan.

Meskipun demikian, Kebijakan Kependudukan, dengan atau tanpa Kementerian Kependudukan, tetap memegang kunci keberhasilan Indonesia masa depan. Kita sepakat bahwa Indonesia 2045 (100 tahun Indonesia merdeka) menjadi momentum penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa pun slogannya, kita harus punya mimpi besar di 2045. Bisa saja kita bermimpi "Indonesia Negara Pancasila yang Berjaya di Bidang Maritim pada 2045". Falsafah Pancasila, dipandang dalam lima dimensi, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, menginspirasi seluruh pemikiran dan pergerakan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Untuk mewujudkan bangsa maritim yang besar, kontribusi sektor maritim dan kelautan dalam pembentukan kesejahteraan masyarakat harus terus meningkat. Namun, kita perlu sadar bahwa rancang bangun 2045 harus didasarkan pada perkiraan situasi penduduk Indonesia saat itu sebagai acuan menyusun cetak biru. Sebenarnya, proyeksi penduduk lebih dari 25 tahun tak disarankan dalam demografi, mengingat semakin jauh kita melakukan proyeksi, semakin tak akurat proyeksi tersebut. Namun, setidaknya kita perlu memperoleh gambaran tentang situasi penduduk di saat 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan penelitian Lembaga Demografi, jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai 324 juta jiwa (skenario optimis) hingga 358 juta jiwa (skenario pesimis). *Population Reference Bureau* (2014) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia sekitar 365 juta di tahun 2050, berarti di 2045 mendekati 350 juta jiwa. Skenario optimis untuk jumlah penduduk tampaknya sulit terpenuhi, mengingat target angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,4 anak per perempuan di tahun 2012 meleset, stagnan selama 10 tahun terakhir di angka 2,6 anak per perempuan.

Selain jumlah, hal yang menarik dicermati adalah adanya perbedaan *rate of growth* antar kelompok umur di tahun 2045. Penduduk usia 0–14 tahun akan mengalami pertumbuhan negatif, penduduk usia produktif (15–64 tahun) tumbuh kurang dari 1 persen, sedangkan penduduk lansia (65 tahun ke atas) tumbuh mendekati 4 persen. Besarnya pertumbuhan penduduk lansia menjadi indikasi bahwa di 2045 Indonesia meninggalkan periode bonus demografi dan masuk ke tahapan *population ageing* (proporsi penduduk lansia membesar). Perbaikan kesehatan meningkatkan usia harapan hidup dan berkontribusi terhadap perubahan struktur umur penduduk.

Di 2045, meskipun sebagian besar lansia Indonesia berpendidikan rendah, diperkirakan mayoritas penduduk usia produktif berpendidikan jauh lebih baik. Lebih dari 35% penduduk usia produktif Indonesia berpendidikan tinggi dan hanya 15% yang berpendidikan SD. Inilah yang menjadi modal bagi Indonesia di 2045. Selain itu, kita punya potensi bonus demografi yang masih akan berlangsung hingga 30 tahun ke depan, tapi dengan prasyarat mampu mengendalikan angka kelahiran. Tidak semua negara di dunia punya potensi bonus demografi.

Dengan skenario pesimis, dalam 30 tahun ke depan ada tambahan lebih dari 100 juta penduduk. Namun, jika kita mampu menjalankan program KB dengan baik, tambahan jumlah penduduk “hanya” sekitar 70 juta jiwa. Rancang bangun 2045 tak hanya sekedar memperhatikan situasi penduduk, tetapi juga harus dibarengi kebijakan pengelolaan penduduk yang lebih baik untuk mencapai Indonesia berjaya 2045.

Karena itulah, buku ini mengajak Anda untuk menjelajahi khazanah kependudukan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihela dari Kebijakan Kependudukan.

BAB 10

PENUTUP: SDM UNGGUL INDONESIA MAJU



Adalah tepat Presiden Jokowi memilih slogan peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia: “SDM Unggul, Indonesia maju”. Jepang, Singapura, Korea, Taiwan, bahkan RRT membuktikan bahwa keberhasilan mereka menjadikan negaranya sebagai negara maju karena sumber daya ma-

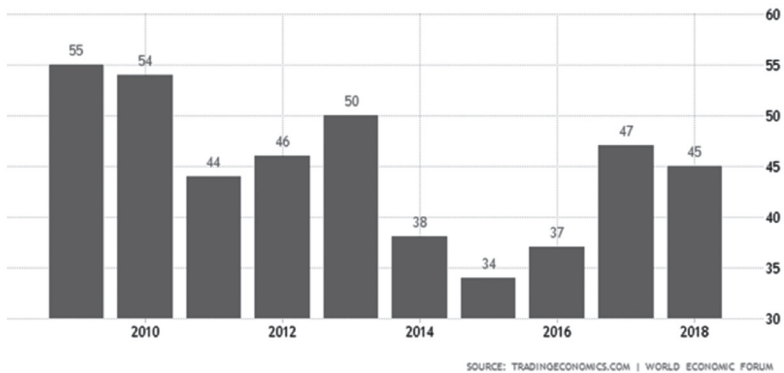
nusia unggul. “*People First, then What?*” jawab Jim Collins dalam *Good to Great* (2001) ketika ditanya apa resep membuat perusahaan dari “biasa-biasa saja” menjadi “hebat”, melampaui “baik”. Kata Jeffrey Pfeffer dalam *Competitive Advantage through People* (1994) bahwa keunggulan kompetitif sangat cepat menjadi usang, dan yang menjadikannya tidak usang adalah keunggulan manusia. Jadi, kalau hendak bersaing, bersainglah di “manusia”.



Manusia yang unggul dapat menghasilkan produk yang unggul, baik barang, jasa, maupun hibridanya. Manusia yang unggul dapat membuat rencana-rencana unggul dan mewujudkannya. Manusia-manusia unggul adalah manusia yang dapat bekerja secara unggul sebagai seorang pribadi, dan dalam sebuah tim. Presiden Jokowi melihat bahwa setelah melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh negeri, meningkatkan konektivitas antarkawasan, maka tugas selanjutnya adalah melejitkan pembangunan manusia. Gagasan itu sudah disampaikan dalam visi Presiden 2019–2024.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi yang baru terpilih untuk kedua kalinya selalu menekankan bahwa periode kedua pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan SDM. Bahkan, pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyampaikan, “... antara 2020 hingga 2024 kita berada di puncak

periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan kita.” Presiden Jokowi meyakini bahwa SDM unggul menjadi lompatan kemajuan Indonesia, namun harus menggunakan cara-cara baru. Tujuannya agar kemajuan dapat diraih lebih cepat dari yang seharusnya.



Berdasarkan *Global Competitiveness Index 2017–2018* (WEF: *Global Competitiveness Report 2017–2018*), Indonesia terus mengalami kenaikan peringkat daya saing global, dari peringkat 50 (2013) menjadi 36 (2018). Namun, peringkat daya saing itu akan naik lebih cepat jika kita mampu memperbaiki daya saing di pilar pendidikan, kesehatan, dan kesiapan teknologi. Sejalan dengan itu, APBN 2019 secara eksplisit bertepatan “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”. Harapannya, tema APBN itu tercermin dalam kebijakan anggaran nasional dan mampu mendukung keinginan kita untuk menciptakan SDM unggul sebagai prasyarat Indonesia maju.

Oleh karenanya, kita harus mampu mendefinisikan SDM unggul dengan tepat. Setidaknya ada lima indikator keunggulan SDM.

Pertama, kemampuan berpikir seseorang atau inteligensinya ditentukan oleh kualitas gizi, terutama saat 1.000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun, tingkat dan kualitas pendidikan yang diperoleh, serta kemampuan literasi. Kemampuan literasi adalah kemampuan individu untuk mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis, yang menghasilkan keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, kualitas fisik yang lebih menggambarkan kondisi kesehatan seseorang, tercermin dari tingkat kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) penduduk. Hal ini umumnya digambarkan oleh indikator usia harapan hidup saat lahir. Ketiga, tingkat kesejahteraan individu yang tercermin dari kemampuan be-



kerja, kemampuan memperoleh pendapatan, dan pemenuhan standar hidup tertentu. Ketiga ukuran tersebut tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai perbandingan kemajuan pembangunan manusia seluruh negara di dunia. Namun, SDM unggul sesungguhnya tidak cukup tercermin dari ketiga indikator di atas. Masih ada dua indikator lain yang dapat mencerminkan SDM unggul dalam konteks Indonesia. Indikator berikut, atau yang keempat, adalah karakter yang berhubungan dengan kualitas spiritual, kematangan emosi, sikap mental, dan perilaku. Memiliki inteligensi tinggi dan berbadan sehat saja tidaklah cukup. Seperti disampaikan Presiden Jokowi, "Kita butuh

SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi." Ideologi Pancasila harus menjadi pandangan hidup dan acuan seluruh manusia Indonesia dalam berperilaku. Bekerja keras dan berdedikasi juga menjadi ciri SDM unggul Indonesia. SDM berperan membangun bangsa dengan landasan rasa nasionalisme. Kelima, SDM unggul adalah SDM yang mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Potensi untuk memimpin, mengembangkan kewirausahaan, mengatasi masalah yang kompleks, melakukan inovasi, mengembangkan kerja sama, dan sebagainya.

Jika disarikan, SDM unggul Indonesia ialah manusia Indonesia yang memiliki inteligensi tinggi, berbadan sehat, dan berpendapatan memadai agar mampu memenuhi standar hidup layak, berkarakter kuat yang dilandasi nilai-nilai spiritualitas, jiwa nasionalisme, dan ideologi Pancasila, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Situasi Kependudukan Terkini

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 atas dasar survei penduduk antarsensus (Supas) 2015 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa dan terus bertambah hingga mencapai 318,96 juta jiwa di tahun 2045. Artinya, akan ada tambahan 52 juta penduduk dalam kurun waktu 26 tahun ke depan. Proyeksi penduduk tersebut menggunakan skenario optimis, dengan asumsi angka kelahiran total (*total fertility rate*) pada 2020 ke atas sudah mencapai angka 2,1 anak per perempuan, yang merupakan *replacement level*.

Dalam 10 tahun Jokowi mengemban amanah sebagai presiden, jumlah penduduk diproyeksikan bertambah sekitar 30 juta

jiwa, yang tentu akan berdampak langsung terhadap tambahan kebutuhan pelayanan publik. Selama periode 2014–2024, kontribusi pertumbuhan penduduk paling besar disumbangkan Jawa Barat, mencapai lebih dari 6,2 juta jiwa, diikuti Banten sebanyak 2,3 juta jiwa. Kedua provinsi yang dulunya satu wilayah itu menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan penduduk Indonesia. Di wilayah Banten dan Jawa Barat sebagai penyangga ibu kota Jakarta, akan terjadi tekanan penduduk yang besar. Mungkin hal ini yang menjadi salah satu argumen Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, ditinjau dari perspektif demografi.

Persebaran penduduk antarpulau relatif tidak banyak berubah. Penduduk yang tinggal di Jawa dan Bali sedikit mengalami penurunan, dari 58,57% menjadi 57,44%. Di Sumatra dan Kalimantan mengalami sedikit kenaikan. Persentase penduduk di Pulau Sumatra naik dari 21,58% menjadi 22,05%. Dan, proporsi penduduk Kalimantan bertambah dari 5,97% menjadi 6,32%.

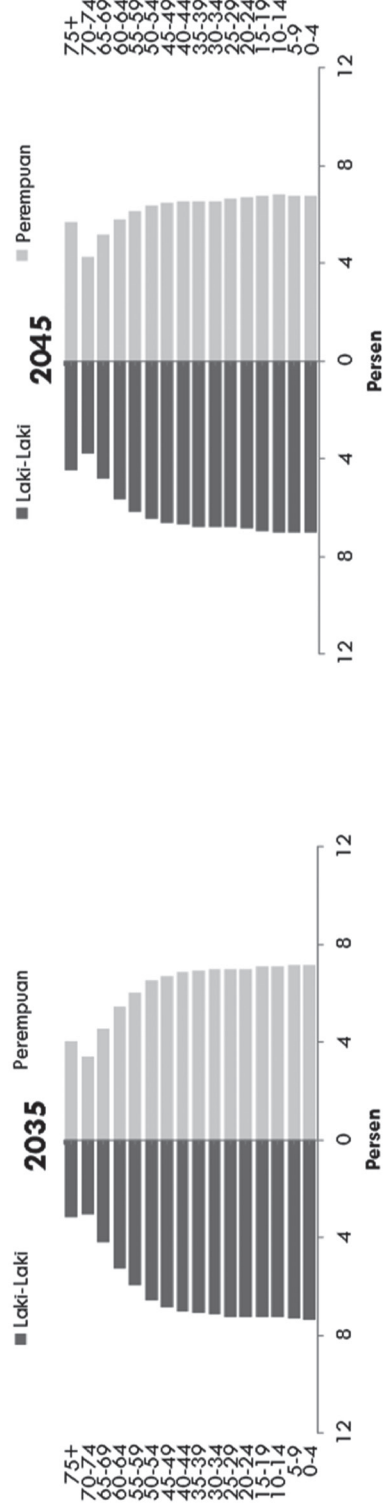
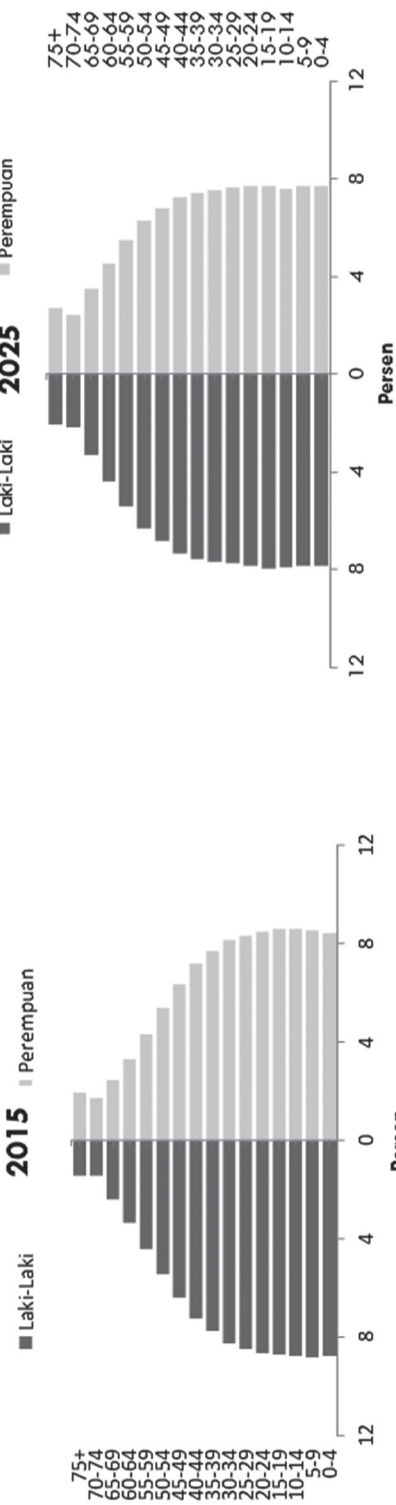
Untuk memperbaiki kesenjangan pembangunan tentu dibutuhkan persebaran penduduk yang lebih merata. Dalam ekonomi regional dijelaskan kemungkinan terjadinya fenomena "*people follow firm* (PFF)" atau "*firm follow people* (FFP)". Pada kasus PFF, penduduk memilih lokasi tinggal dengan mengikuti konsentrasi aktivitas ekonomi. Asumsinya, jika kita menebar "gula", "semut" akan datang menghampiri. Namun, pada fenomena FFP, justru aktivitas ekonomi yang mengikuti di mana penduduk terkonsentrasi. Investasi memilih wilayah-wilayah yang padat penduduknya. Pertanyaan berikutnya, Indonesia cenderung mengalami fenomena PFF atau FFP?

Berdasarkan pola persebaran penduduk Indonesia selama hampir 50 tahun terakhir, FFP justru cenderung mendominasi. Jika kita membiarkan mekanisme pasar bekerja sendiri, aktivitas

ekonomi akan terus memilih lokasi yang konsentrasi penduduknya besar. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah pun semakin besar.

Kebijakan pemindahan ibu kota mungkin dapat menjadi alternatif, mengurangi beban konsentrasi penduduk di wilayah Jawa bagian Barat dan mendorong persebaran penduduk yang lebih merata di Indonesia Timur.

Struktur umur penduduk Indonesia masih didominasi usia produktif (15–64 tahun) dengan jumlah mencapai 183,36 juta jiwa, jauh melampaui jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) sebanyak 66,17 juta jiwa dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 17,37 juta jiwa. Rasio ketergantungan mencapai angka 45, yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 45 penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan tahun 2019 merupakan yang terendah selama ini dan akan bertahan rendah hingga 2024. Hal ini menandai bahwa kita sedang memasuki periode terbaik bonus demografi. Rasio ketergantungan akan terus mencetak rekor terendah hingga 2023 dan setelah itu diproyeksikan akan terus naik. Selama periode 2019 dan 2045, struktur umur penduduk akan berubah. Jumlah penduduk usia 0–14 tahun relatif stabil, namun cenderung turun sebagai konsekuensi penurunan *total fertility rate*. Penduduk usia produktif terus meningkat, namun dengan proporsi semakin kecil. Sebaliknya, jumlah lansia meningkat tiga kali lipat sepanjang periode 2019–2045, konsekuensi membaiknya usia harapan hidup.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Penduduk usia 60+ (dengan memasukkan kelompok lansia muda) akan melonjak drastis dari 20,8 juta jiwa (2014) menjadi 32,3 juta jiwa (2024). Kebijakan pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lansia. Agar dapat mendukung lansia produktif, dibutuhkan kebijakan strategi investasi yang memberi peluang partisipasi lansia bekerja sehingga mengurangi ketergantungannya pada kelompok penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia balita (di bawah lima tahun) akan turun dari sekitar 24,0 juta jiwa (2014) menjadi 22,8 juta jiwa (2024). Kondisi ini mencerminkan turunnya kebutuhan penduduk usia balita. Kebijakan pendidikan anak usia dini harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas PAUD yang ada dan bukan sekadar penambahan PAUD baru. Jumlah penduduk usia sekolah (7–18 tahun) sedikit mengalami kenaikan dari 31,5 juta anak (2014) menjadi 32,5 juta anak (2024).

Tahun 2020 mendatang, hampir 57% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, menyisakan 43% penduduk perdesaan. Pada tahun 2025, diproyeksikan 60% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Ada tiga sumber pertumbuhan penduduk perkotaan, yaitu migrasi penduduk desa ke kota, tingginya pertambahan penduduk alamiah (kelahiran dikurangi kematian) di perkotaan, dan berubahnya status kawasan perdesaan menjadi perkotaan.

Namun, persentase penduduk perkotaan di atas merupakan angka proyeksi yang belum memperhitungkan dampak kebijakan pembangunan desa. Selama lima tahun terakhir, pemerintah menyalurkan lebih dari 257 triliun rupiah dana desa ke desa. Belum lagi alokasi dana desa yang besarnya minimal 10% dari dana transfer umum pemerintah pusat ke daerah dengan akumulasi mencapai lebih dari 176 triliun rupiah. Setidaknya, 433 triliun rupiah uang mengalir ke desa selama 2015–2019. Aktivitas

ekonomi desa terus meningkat, sehingga menahan laju migrasi desa ke kota dan justru berpotensi menciptakan migrasi balik kota ke desa.

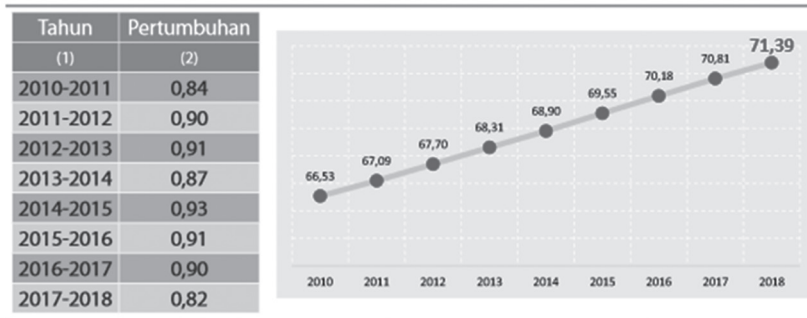
Tantangan Kependudukan ke Depan

Data BPS 2018 menunjukkan bahwa IPM Indonesia telah mencapai angka 71,39 (kategori *high human development*), naik dari tahun 2010 yang baru mencapai 66,53. Namun, hanya sembilan provinsi yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional, yaitu Sumbar, Riau, Kepri, DKI Jakarta, DIY, Banten, Bali, Sulut, dan Kaltim. Tahun 2010 lalu, masih ada empat provinsi berstatus *low human development*, yaitu Sulbar, NTT, Papua, dan Papua Barat. Di 2018, tak ada lagi provinsi yang berstatus *low human development*, dan hal ini menjadi prestasi dalam pembangunan manusia Indonesia.

IPM hanya mengukur tingkat pendidikan atau lamanya bersekolah, tidak mengukur kualitas pendidikan. Masalahnya, naiknya tingkat pendidikan penduduk belum dibarengi perbaikan kualitas. Penelitian Pritchett (2016) memperbandingkan bahwa keahlian tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia setara tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di Denmark. Skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) untuk Indonesia tahun 2016 tidak mengalami perkembangan signifikan selama kurun waktu 15 tahun, masih di bawah angka 400. Padahal, semua negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) punya rata-rata di atas 500. Skor PISA Indonesia untuk bidang matematika di angka 386, jauh di bawah skor Singapura (564) dan Vietnam (495). Untuk kemampuan membaca, skor PISA Indonesia (397), juga masih jauh di bawah Singapura (535) dan Vietnam (487). OECD memperkirakan skor PISA matematika, IPA, dan membaca untuk Indonesia baru mampu mencapai rata-rata

skor negara OECD pada 2065 mendatang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk mewujudkan SDM unggul.

Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 2010–2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Harapan lama sekolah penduduk usia tujuh hingga 24 tahun telah mencapai angka 12,85 tahun, jauh lebih baik dibanding rata-rata lama sekolah penduduk usia dewasa yang hanya 8,10 tahun (setara kelas 8 SMP). Penduduk muda Indonesia memiliki harapan menempuh pendidikan hingga ke bangku kuliah. Meskipun seluruh provinsi mengalami kenaikan tingkat pendidikan penduduk secara signifikan, kesenjangan pendidikan antarprovinsi masih menjadi tantangan. Pembangunan infrastruktur fisik di daerah tertinggal diharapkan dapat memperbaiki akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, kualitas pendidikan belum merata, sehingga pembangunan pendidikan ke depan bukan hanya kuantitas pendidikan, melainkan juga kualitas pendidikan. Kualitas pengajaran oleh guru terus kita tingkatkan baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kesejahteraan. Kita pastikan mutu pendidikan melalui peningkatan kapasitas dan uji sertifikasi guru.

Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh tiga hal, yaitu perilaku hidup masyarakat, kepemilikan jaminan kesehatan nasional, dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan obat. Usia harapan hidup yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat terus meningkat. Bandingkan saja, di tahun 1980 angka harapan hidup baru mencapai 52 tahun, dan pada 2017 sudah mencapai hampir 71 tahun. Angka kematian bayi turun dari 32 (2012) menjadi 24 (2017) per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita juga terus turun dari 40 (2012) menjadi 32 (2014) per 1.000 kelahiran hidup. Di tengah berbagai penolakan terhadap imunisasi, cakupan imunisasi balita membaik, dari 86,5% (2015) menjadi 91,1% (2017).

Saat ini masih ada tiga dari 10 anak Indonesia di bawah usia lima tahun mengalami stunting (gagal tumbuh). Penyebabnya bisa karena masalah kekurangan gizi, bisa juga karena sanitasi yang buruk atau tidak tersedianya air bersih, sehingga menimbulkan infeksi bagi balita dan anak. Di tahun 2017, rasio tenaga kesehatan (nakes) dengan penduduk 3,7 nakes per 10 ribu penduduk, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 15,1 nakes per 10 ribu penduduk. Tenaga kesehatan terdiri atas tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis) dan paramedis (tenaga psikologi klinis, perawat, bidan, kefarmasian, ahli mikrobiologi, nutrisisionis, dietisien, fisioterapis, akupunkturis, rekam medik, dan sebagainya). Kita juga dihadapkan pada buruknya perilaku remaja yang berisiko terhadap kesehatannya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (2018), 23% remaja laki-laki usia 13–15 tahun di Indonesia merokok.

Derajat kesehatan ibu memengaruhi angka kematian ibu. Kita tidak ingin seorang ibu justru kehilangan nyawanya di saat menghadirkan sebuah kehidupan baru. Persentase kelahiran di fasilitas kesehatan meningkat dari 63,2% (2012) menjadi

83,67% (2017) dan perlu terus ditingkatkan. Saat ini 90,9% penolong persalinan adalah tenaga kesehatan. Masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan tradisional yang berisiko tinggi di masa lalu. Pelayanan kesehatan ibu untuk menjamin agar ibu mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Namun, angka kematian ibu melahirkan masih berada di angka 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Keberhasilan pembangunan kesehatan ditopang kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Di tengah tantangan meningkatnya defisit, kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 2018 lalu mencapai 196 juta orang. Perbaikan mutu pelayanan kesehatan juga tercermin dari persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat layak konsumsi. Tantangan pembangunan kesehatan terkait dengan pola hidup yang berdampak pada meningkatnya prevalensi penduduk penderita penyakit tidak menular, seperti jantung, kanker, hipertensi, dan diabetes melitus. Meskipun akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan membaik, upaya pencegahan (preventif) tetap lebih baik dibanding mengobati.

Untuk situasi ketenagakerjaan, data survei angkatan kerja nasional (Sakernas) BPS Maret 2019 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai lebih dari 136,18 juta orang. Tantangannya, masih ada 5,13% (6,82 juta jiwa) berstatus pengangguran terbuka di Indonesia. Penduduk yang bekerja sebagian besar (hampir 30%) mengandalkan sektor pertanian. Ada 14,7% pekerja berada di sektor industri manufaktur. Sektor ketenagakerjaan kita dihadapkan pada tantangan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja dan tingginya angka pengangguran pada pekerja berpendidikan SMA/SMK. Sekitar 57% angkatan kerja berpendidikan maksimal SMP. Masalahnya, pengangguran di Indonesia justru didominasi lulusan SMK yang

seharusnya memiliki keterampilan bekerja lebih baik dibanding lulusan SMA. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan pendidikan kejuruan/vokasi di Indonesia.

Dalam hal perbaikan produktivitas, peran perusahaan Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja masih minim. Kurang dari 10% perusahaan di Indonesia memberikan pelatihan formal. Bandingkan dengan Filipina, yang lebih dari 60% perusahaannya memberikan pelatihan formal bagi pekerja. Bagaimanapun, tanggung jawab mewujudkan SDM unggul Indonesia tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya.

Desa masa depan Indonesia ialah desa yang mampu menyediakan dan mendukung kualitas hidup manusia Indonesia, setidaknya sama baiknya dengan kualitas hidup di kota, tanpa kehilangan ciri desa yang berbasis pertanian. Penduduk desa masa depan harus dapat menikmati pendidikan yang sama kualitasnya dengan pendidikan di kota. Pelayanan kesehatan di desa sama baiknya dengan di kota. Peluang untuk memperoleh pekerjaan layak di desa sama dengan di kota, dan sebagainya.

Pembangunan desa dapat dikatakan berhasil, salah satunya jika terjadi penurunan laju urbanisasi. Apabila Sensus Penduduk 2020 nanti menghasilkan persentase penduduk perkotaan kurang dari 57%, ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan desa dalam menahan laju urbanisasi lebih rendah dari yang diproyeksikan. Beban penduduk perkotaan yang semakin besar berimplikasi terhadap penurunan daya dukung lingkungan perkotaan. Tanpa antisipasi memadai, kualitas hidup penduduk perkotaan akan menurun. Sebaliknya, pembangunan secara masif di desa berdampak pada peningkatan kualitas hidup penduduk perdesaan.

Ke depan, arus migrasi balik dari kota ke desa justru terjadi. Kita perlu mengantisipasi hal ini. Antisipasi terhadap berkurangnya

ketersediaan pekerja di perkotaan. Antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan publik di perdesaan. Infrastruktur yang dibangun dari dana desa berhasil membuka keterisolasian di banyak desa. Capaian pembangunan desa selama periode pertama pemerintahan Jokowi patut diapresiasi. Namun, kita harus mengantisipasi kemungkinan lonjakan kebutuhan pelayanan publik di desa. Peningkatan kebutuhan karena meningkatnya kesejahteraan penduduk desa dan kemungkinan arus balik migrasi kota ke desa. Dengan antisipasi kebijakan yang tepat, desa dapat mencegah kehilangan penduduk usia produktifnya dan mampu mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri berkelanjutan.

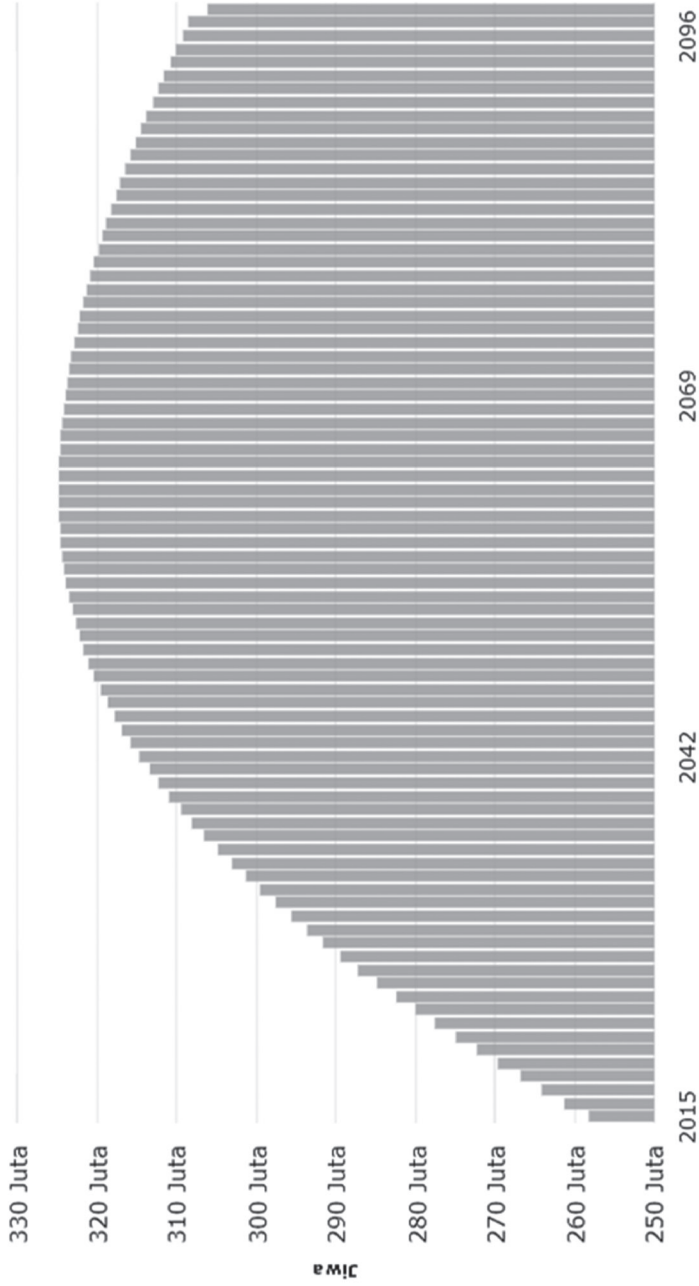
Dengan data ini, kebijakan demografi Indonesia pada saat ini dan lima tahun ke depan tampaknya perlu berfokus pada lima agenda: menjaga pertumbuhan jumlah penduduk untuk tetap rendah; meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan anak-anak di bawah lima tahun (balita), terutama berkenaan dengan gizi; meningkatkan kualitas persebaran penduduk dari kawasan padat, khususnya Jawa, ke kawasan kurang padat, khususnya luar Jawa. Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan salah satu strategi kebijakan demografi yang efektif. Selanjutnya, kebijakan peningkatan kompetensi penduduk menjelang usia kerja, pada saat usia kerja, dan menjelang akhir usia kerja—karena kelak pada pasca-kerja akan tetap perlu bekerja dalam profesi yang sesuai dengan keberadaannya. Terakhir adalah menyiapkan kebijakan *pasca-bonus demografi*, termasuk memperhatikan keseimbangan demografis untuk mempertahankan kualitas inovasi bangsa Indonesia, seperti teori James Liang dalam *The Demographics of Innovation* (2016).

Kebijakan masa depan ini merespons perkiraan PBB bahwa populasi Indonesia diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan dan mencapai puncaknya pada 2062, yaitu 324,76 juta

jiwa dengan asumsi *medium fertility variant*. Angka tersebut menempatkan Indonesia di urutan keenam sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia. Namun, setelah itu jumlah penduduk Indonesia akan mengalami penurunan seiring rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lanjut usia hingga akhir abad ke-21, yaitu 306 juta jiwa.

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Perkiraan PBB (2015-2100)

Sumber : United Nations Population Division, 2017



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan-mencapai-puncaknya-pada-2062>

Pada tahun 2045, Bappenas memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mendekati 320 juta jiwa, dan menempati peringkat ketujuh negara dengan penduduk terbanyak di dunia, setelah India, yang akan “menyalip” China, kemudian, Amerika Serikat, Brasil, Nigeria, dan Pakistan. Pada tahun tersebut usia harapan hidup meningkat menjadi 75,5 tahun. Artinya, tahun 2045 Indonesia akan memiliki lansia dalam jumlah cukup banyak, yaitu sekitar 45 juta jiwa, meningkat hampir empat kali lipat. Namun, pada tahun tersebut, lansia dengan usia di atas 65 tahun masih produktif. Kondisi kemajuan Indonesia 2015 dimulai sejak tahun 2038 dengan kuatnya kelas menengah Indonesia. Kelompok berpendapatan rendah jumlahnya semakin sedikit dan digantikan oleh *middle income* atau negara berpendapatan menengah. Pada 2045, dengan jumlah penduduk mendekati 320 juta, 69% penduduk masuk kelompok *middle income*.

Mewujudkan SDM Unggul

Proyeksi penduduk Indonesia 2015–2045 memperlihatkan dua fenomena menarik dalam perspektif bonus demografi. Pertama, ternyata periode puncak bonus demografi yang sering diistilahkan sebagai jendela peluang (*the window of opportunity*) maju lebih awal delapan tahun. Menurut proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, periode puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2028–2031 yang ditandai dengan rasio ketergantungan terendah sebesar 46. Proyeksi penduduk terbaru memperlihatkan bahwa puncak bonus demografi terjadi lebih awal di tahun 2020–2024, bahkan dengan rasio ketergantungan yang lebih rendah, sebesar 45. Kedua, bonus demografi akan berakhir lebih cepat dari proyeksi sebelumnya. Jika pada proyeksi penduduk sebelumnya, bonus demografi diproyeksikan berlangsung selama tahun 2012 hingga 2042, proyeksi terbaru

menunjukkan bahwa bonus demografi akan berakhir di 2037, lebih cepat lima tahun.

Tentu harus ada respons tepat dari pemerintah terhadap informasi di atas. Pertama, kita menyadari bahwa RPJMN 2020–2024 diimplementasikan justru di saat Indonesia sedang berada pada periode terbaik bonus demografi. RPJMN 2020–2024 harus didesain agar mampu secara nyata mentransformasi bonus demografi menjadi bonus ekonomi. Melimpahnya penduduk usia produktif harus bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, periodenya yang lebih pendek mengharuskan kita bekerja lebih cepat untuk meraih manfaat sebelum bonus demografi itu berakhir.

Transformasi bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan Indonesia akan terwujud jika penduduk usia produktif yang termasuk angkatan kerja, dapat bekerja secara layak dan sejahtera. Bekerja bukan hanya sekadar melakukan aktivitas kerja, melainkan juga memperoleh kompensasi atau balas jasa yang memadai. Data survei angkatan kerja nasional (sakernas) BPS bulan Agustus 2018 menunjukkan ada 131 juta penduduk Indonesia yang termasuk kelompok angkatan kerja. Sebanyak 70,78 juta (56,76%) bekerja di sektor informal dan sisanya di sektor formal—lebih banyak mereka yang bekerja di sektor informal dibanding formal. Jika ingin pekerja kita bekerja lebih layak dan sejahtera, proporsi pekerja di sektor formal harus ditingkatkan. Caranya dengan memperbaiki daya saing nasional sehingga mampu mendorong peningkatan investasi di sektor formal.

Kita menyadari bahwa pembangunan pendidikan dan kesehatan berkualitas, pengembangan keterampilan, pembangunan karakter, dan pemenuhan pangan berkualitas bagi penduduk menjadi prasyarat mutlak menciptakan SDM unggul. Namun, secara kerangka konseptual, setidaknya ada empat strategi kebijakan

untuk mewujudkan SDM unggul. Strategi pertama bahwa pembangunan manusia harus menggunakan pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*), ada tantangan dan kebutuhan berbeda di setiap tahap. Kehidupan manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tahapan ketergantungan (*stage of dependency*) dan tahapan produktif (*stage of productivity*). Tahapan ketergantungan terbagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak dan lanjut usia. Merumuskan kebijakan yang tepat di setiap kelompok tahapan sangatlah penting.

Membentuk manusia unggul dimulai sejak konsepsi dalam rahim. Penelitian menunjukkan bahwa apa yang terjadi sejak masa janin akan memengaruhi kualitas hidup anak di masa depan hingga mereka mencapai usia dewasa. Membangun SDM unggul harus memperhatikan intervensi dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Selama sembilan bulan dalam kandungan hingga usia dua tahun merupakan 1.000 hari pertama terpenting dalam membentuk SDM unggul. Setiap bayi lahir membutuhkan ibu yang sehat, asupan yang baik, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, khususnya pada dua tahun pertama kehidupan mereka.

Strategi kedua, kebijakan pembangunan keluarga. Kita sering kali lupa bahwa keluarga menjadi wahana pertama dan utama dalam pembentukan SDM unggul. Sebagian orang melupakan pentingnya peran institusi keluarga dan cenderung menyerahkan tanggung jawab ini pada institusi di luar keluarga, seperti PAUD, sekolah, dan sebagainya. Agar pembangunan keluarga berjalan efektif, kita harus merancang konseling pranikah tentang keluarga bagi setiap pasangan yang akan menikah. Bagaimanapun, konseling pranikah tersebut diharapkan dapat memberi bekal bagi pasangan yang akan menikah untuk menjadi orangtua hebat.

Strategi ketiga, pembagian peran yang jelas dalam peta jalan pembangunan SDM unggul. Meskipun peran pemerintah penting,

tanggung jawab pembangunan manusia bukan hanya milik pemerintah. Selain pemerintah, pihak swasta, dunia akademik, organisasi non-pemerintah, dan keluarga harus bahu-membahu sesuai perannya. Perusahaan harus ikut serta memberi pelatihan formal, memastikan kebijakan mendukung para pekerja untuk tetap dapat mengasuh anak secara optimal, meningkatkan keterampilan bekerja bagi para pekerja, dan sebagainya. Selain itu, harus ada desain pembagian peran pemerintah pusat dan daerah yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan.

Presiden Jokowi berulang kali menekankan bahwa saat ini, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, melainkan mereka yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Pembangunan SDM itu jangka panjang dan tidak instan. Namun, kita butuh terobosan yang dapat memotong waktu untuk meraih kemajuan.

Oleh karenanya, strategi keempat ialah segera mewujudkan institusi khusus yang mengelola manajemen talenta. Institusi ini bertugas mengidentifikasi, menganalisis, mengembangkan, dan mendayagunakan talenta yang dibutuhkan untuk akselerasi kemajuan Indonesia. Tidak hanya talenta di dalam negeri, tetapi juga diaspora Indonesia di luar negeri. Tidak hanya sepak bola yang bisa mengumpulkan pemain berbakat berdarah Indonesia di luar negeri, tetapi juga seluruh jenis talenta yang dibutuhkan untuk lompatan kemajuan Indonesia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat mentransformasikan kebanggaan dan rasa cinta tanah air mereka menjadi sumbang nyata bagi Indonesia maju. Melalui pengelolaan manajemen talenta secara khusus, kita dapat mengetahui kekuatan talenta yang ada, untuk melibatkan mereka sesuai kebutuhan pembangunan yang dapat menciptakan lompatan kemajuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ADB. *Asia 2015: Realizing Asian Century dan UNDP.*

ADB. *HRD 2013: Rise of the South.*

Adioetomo, SM. 2005. Bonus Demografi: Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ekonomi Kependudukan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.

[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019*. Jakarta.

[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035*. Jakarta.

[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. *Laporan Pembangunan Milenium*. Jakarta.

[Kemenkes] Kementerian Kesehatan. Badan Penelitian dan Pengembangan. 2017. *Operationalizing a Multi-Sectoral Approach for the Reduction of Stunting in Indonesia*. Jakarta.

[BPS] Badan Pusat Statistik. *Berbagai Terbitan. Survei Angkatan Kerja Nasional*. Jakarta.

[BPS] Badan Pusat Statistik. *Berbagai Terbitan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. *Berbagai Terbitan. Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Sensus Penduduk Indonesia*. Jakarta.
- Bill, Creech. 1994. *The Five Pillars of TQM: How to Make Total Quality Management Work for You*.
- Collins, Jim. 2001. *Good to Great*.
- De Onis, M., Blossner, M., Borghi, E. 2011. *Prevalence and Trends of Stunting among Pre-School Children, 1990–2020*. Public Health Nutrition, 15 (01). hh. 142–148.
- Dye, Thomas R. 2016. *Understanding Public Policy (15th Edition)*, New York: Pearson.
- Fauzi, Gamawan. 2014. Menteri Dalam Negeri. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2014.
- Greenhalgh, Susan, Edwin WA. 2005. *Governing China's Population: From Leninist to Neoliberal Biopolitics*. Thomson. Harvard University. South Western. USA.
- Hyman, DN. (2011, 1982). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*.
- Harmadi, Sonny HB. 2019. Mencermati Tema Debat Cawapres 2019. Kompas, 16 Maret 2019.
- Harmadi, Sonny HB. 2019. Situasi dan Tantangan Kependudukan 2019. Kompas, 28 Desember.
- Harmadi, Sonny HB. 2019. Tantangan Kependudukan. *Kompas*, 13 Juli.
- Harmadi, Sonny HB. 2019. Merealisasikan SDM Unggul. *Kompas*, 10 September.

- Hizli, S., Abaci, A., Buyukgebiz, B., Buyukgebiz, A. 2007. *Nutritional Stunting. Pediatric Endocrinology Reviews*; PER, 4 (3), hh. 186–195.
- Hillman, A.L. 2009: 18–19. *Public Finance and Public Policy; Responsibilities and Limitations of Government*.
- Hoddinott, J., Maluccio, J., Behrman, J., Flores, R. & Martorell, R. 2008. *Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adult*. *Lancet*. hh. 411–416.
- Johnson, G & Lee, R. 1987. *Population Growth and Economic Development: Issues and Evidence*. In: *Social Demography Series*.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2011. Kemendagri, Kemendagri & RB, Kemenkumham, Kemensetneg, Setwapres, LAN, DPR, DPD, dan DPRD menghilangkan modul kebijakan publik sejak tahun 2011.
- Krugman, Paul. 1994. *The Age of Diminished Expectations*. The MIT Press.
- Lewit, E. & Kerrebrock, N. 1997. *Population-Based Growth Stunting. Future Child*, 7 (2), p. 149.
- Liang, J. *The Demographics of Innovation*. Why Demographics is a Key to the Innovation Race.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Principles of Economics. Fourth Edition*.
- Malthus, T. 1998. *An Essay on the Principles of Population*. 1776-1834.
- Martorell, R. & Young, M. 2012. *Patterns of Stunting and Wasting: Potential Explanatory Factors, Advances in Nutrition: An International Review Journal*. 3 (2), hh. 227-233.

- Meadows. 1972. *The Limit to Growth*.
- Mintzberg. 1996. *Managing Government, Government Management*. HBR May – June 1996 Issue Madison, WI: *University of Wisconsin Press*.
- Musgrave, R., & Peggy B. 1989/1937; hh 6. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition, California.
- Nugroho, Riant. 2017. Rembugnas 2017: Membangun Kebijakan Publik Unggul. *Koran Sindo*, 20 Oktober 2017.
- Nugroho, Riant. 2015. *Alchemy of Policy. International Conference for Public Administration*. Bandung.
- OECD. 2001. *Manual for measurement of productivity*.
- Onis, M. 2006. *WHO Child Growth Standards*. Geneva: *World Health Organization*. Department of Nutrition for Health and Development.
- Pangestu, Mari, Atji, Raymond, & Mulyadi, Julius. 1996. *Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Pfeffer J. 1994. *Competitive Advantage Through People*.
- Pritchett. 2016. *The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia*.
- Porter, M. 2006. *Bishop William Lawrence University Professor at Harvard Business School*.
- Ray, Debraj. 1998. *Development Economics*. Princeton University Press. New Jersey.
- Stephen, R. Covey, A. Merrill Roger, & Rebecca R. Merrill. 1994. *First Things First*.
- Rio 2015. *Konferensi PBB: Sustainable Developments* pada tahun

2012.

Rogers, E.M. 1976. *Diffusion of Innovations*.

Rostow. 1960, *The Stages of Economic Growth*.

Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. 2009. *Economic Development*. Addison Wesley.

Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development*. Ninth Edition. Pearson Education Limited. England.

[WHO] World Health Organization. 2010. *Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide*.

Unicef.in. 2017. Stunting/UNICEF. [online]: <http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting>. 1 September 2007.

Unicef.org. 2017. UICEF – Progress for Children 2007 – *Stunting, wasting, and overweight*. [online]: http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41505.htm. 4 September 2017.

Who.int. 2017. WHO/Description [online]: <http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2html>. 3 September 2017.

[WHO] World Health Organization. 2017. Stunting in nutshell. [online]: http://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videon/en/. 2 September 2017.

PROFIL PENULIS

Dr. Sonny Harry Budiutomo

Harmadi saat ini mengemban amanah sebagai Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sejak Januari 2011-sekarang menjabat Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia yang memiliki perwakilan di 33 provinsi dan



hampir 300 kabupaten/kota di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (2005). Menjadi pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 2002, dan selama periode 2009-2016 menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi di Universitas Indonesia. Penulis merupakan staf pengajar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, serta aktif memberi kuliah diantaranya di Universitas Jambi dan Universitas Airlangga. Penulis juga mengajar pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Sekolah Staf Komando TNI AL (Seskoal) dan Sespimti Polri. Penulis merupakan Alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII Lemhannas RI.

Pada 2008 meraih penghargaan sebagai peneliti muda terbaik Universitas Indonesia untuk bidang Sosial Humaniora. Di tahun 2009 meraih penghargaan sebagai peneliti berprestasi peringkat 1 Universitas Indonesia. Pada tahun 2010, Sonny ditetapkan sebagai dosen berprestasi peringkat 1 Universitas Indonesia dan dosen berprestasi nasional peringkat 3 yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Menulis artikel di Kompas dan berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional. Pada 2015-2016 menjadi Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bppenas). 2016-2019 menjadi Staf Ahli Menko PMK Bidang Kependudukan merangkap Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK. Ia pernah bekerja sebagai konsultan di GTZ, Asian Development Bank, UNDP Regional Centre di Colombo Sri Lanka dan UNDP Timor-Leste. Ia juga pernah menjadi Penasehat Khusus Menteri Pertanian dan Perikanan Timor-Leste untuk bidang ekonomi. Menulis kolom pada Harian Kompas dan sejumlah jurnal ilmiah nasional dan internasional. Menjadi pembicara pada berbagai forum nasional dan internasional.



Dr. Riant Nugroho adalah *public policy specialist*, Ketua Rumah Reformasi Kebijakan (Institute for Policy Reform), dan pengajar tamu pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Achmad Yani.

Ia pernah mengajar di University Malaya (Kuala Lumpur), Sunkyun-kwan University (Seoul), dan Guru Besar Tamu di School of Public Administration and Political Science, University of Electronic Science & Technology China (Chengdu). Ia juga pernah mengajar di Diklapim LAN I & II, SESKOAD, SESSKO TNI, dan Lemhannas.

Kegiatan lainnya adalah menulis artikel untuk harian *Kompas*, *The Jakarta Post*, *Bisnis Indonesia*, dan sejumlah jurnal ilmiah nasional dan internasional serta menjadi pembicara pada berbagai forum nasional dan internasional. *Public Policy* (Elex Media Komputindo) dan *Policy Making* (Elex Media Komputindo) adalah dua bukunya yang bestseller.